

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	3
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Pos Kota

Ketua MPR: Jalan berbayar Tambah beban Rakyat

JAKARTA (Poskota) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyoro ti rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta tengah membahas rancangan peraturan daerah tentang pemberlakuan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing_ (ERP).

Bamsoet panggilan akrabnya mengatakan pemberlakuan jalan berbayar ini akan berdampak pada perekonomian masyarakat, menambah beban ekonomi masyarakat yang masih belum sepenuhnya pulih khususnya bagi kalangan menengah kebawah

"Sebab MPR meminta pemerintah agar mengkaji kembali rencana pemberlakuan jalan berbayar atau ERP di sejumlah ruas jalan DKI Jakarta, dengan tetap mempertimbangkan dari segala aspek/sisi baik positif maupun negatifnya," tutur Bamsoet di Jakarta, Rabu (11/1)

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar ini juga minta Pemprov DKI untuk dapat menjelaskan kepada masyarakat, urgensi pemberlakuan ERP tersebut.

Disamping itu, MPR menilai, perlu adanya pembenahan infrastruktur jalan serta uji coba terlebih dahulu yang dilakukan secara bertahap yang bertujuan untuk mengamati efektivitas ERP dalam membatasi kendaraan pribadi dan mengurangi kemacetan lalu lintas secara signifikan sebelum diterapkan secara keseluruhan.

Sementara, Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggota Wicitra mengusulkan pemberlakuan Electronic Road Pricing (ERP) atau sistem berbayar di beberapa ruas jalan Jakarta untuk mengedepankan prinsip kemanfaatan guna pengurangan kemacetan.

"Prinsipnya kami setuju dengan segala upaya penanganan kemacetan. ERP bisa menjadi solusi tapi kita harus

pikirkan betul manfaatnya. Karenanya kami usulkan agar pendapatan dari ERP dialokasikan untuk peningkatan kualitas transportasi umum," kata Anggara di Jakarta, Rabu (11/1/2023).

"Salah satunya untuk percepatan pembangunan LRT serta menambah rute dan armada bus Transjakarta," tambahnya.

Ia mengatakan tujuan dari ERP pada dasarnya adalah pengurangan moda transportasi pribadi.

Subsidi Angkutan Umum

Sebelum resmi diterapkan di Jakarta, Pakar Transportasi, Djoko Setijowarno menyebut, ada sejumlah pihak yang diuntungkan dalam aturan jalan berbayar elektronik ini. Yakni Pemerintah DKI dan pengusaha electric vehicles (EV).

Nantinya, kata Djoko, sistem ini ada tarif yang mesti dibayar kendaraan motor dan mobil bila melewati jalan yang diberlakukan ERP.

Uang pembayaran tarif ERP itu, kata Djoko, nanti bakal masuk ke kas daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Uang tersebut sangat bermanfaat untuk perkembangan transportasi di ibu kota.

"Uangnya itu masuk ke pemprov. Uang ya untuk apa, untuk subsidi angkutan umum ditujunya ke sana," kata Djoko saat dihubungi, Rabu (11/1/2023).

Djoko juga mengatakan, ada pengusaha sistem electric vehicles (EV) yang kecipratan keuntungan dalam kebijakan jalan berbayar elektronik ini. "Pemilik EV (yang diuntungkan juga)," ucap Djoko. **(aldi/johara/yo)**